

BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA SERAHKAN DUA BELAS LHP ATAS LKPD TA 2011

Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah.

Sampai dengan akhir Mei 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan Dua Belas LHP atas LKPD TA 2011, yaitu Pemkab Pakpak Bharat, Pemkab Asahan, Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Tapanuli Utara, Pemko Pematang Siantar, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemkab Simalungun, Pemko Tebing Tinggi, Pemkab Serdang Bedagai, Pemko Tanjung Balai, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Mandailing Natal.

Adapun pemda yang menjadi entitas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan meliputi 33 pemerintah kota/pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah provinsi Sumatera Utara. [arra]

Entitas	Opini	Penyerahan
Kabupaten Pakpak Bharat	Wajar Dengan Pengecualian	14 Mei 2012
Kabupaten Asahan	Wajar Dengan Pengecualian	16 Mei 2012
Kabupaten Labuhanbartu	Wajar Dengan Pengecualian	16 Mei 2012
Kabupaten Tapanuli Utara	Wajar Dengan Pengecualian	22 Mei 2012
Kabupaten Pematang Siantar	Wajar Dengan Pengecualian	22 Mei 2012
Kabupaten Tapanuli Selatan	Wajar Dengan Pengecualian	25 Mei 2012
Kabupaten Simalungun	Wajar Dengan Pengecualian	25 Mei 2012
Kota Tebing Tinggi	Wajar Dengan Pengecualian	28 Mei 2012
Kabupaten Serdang Bedagai	Wajar Dengan Pengecualian	28 Mei 2012
Kota Tanjung Balai	Wajar Dengan Pengecualian	29 Mei 2012
Kabupaten Humbang Hasundutan	Wajar Tanpa Pengecualian	29 Mei 2012
Kabupaten Mandailing Natal	Wajar Dengan Pengecualian	30 Mei 2012



**Tahun Keempat
Edisi Mei 2012**



Selasa, 29 Mei 2012, bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan, BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LHP atas LKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2011. Opini yang diberikan oleh BPK RI

terhadap LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2011 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan pemerintah daerah pertama di Provinsi Sumatera Utara yang mendapatkan opini WTP. LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2011 ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktni, kepada Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Bangun Silaban, dan Bupati Humbang Hasundutan, Maddin Sihombing.

Selama kurun waktu enam tahun (2005 s.d. 2011), belum ada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD yang diserahkan kepada BPK RI. Opini yang tertinggi yang selama ini diberikan oleh BPK RI adalah Wajar Dengan

Pengecualian (WDP). Kabupaten Humbang Hasundutan selama kurun waktu empat tahun berturut-turut, yaitu mulai tahun 2007 sampai dengan 2010, mendapatkan opini WDP.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan mengatakan bahwa BPK berharap agar opini ini dapat dipertahankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk tahun – tahun berikutnya sehingga pengelolaan keuangan di Provinsi Sumatera Utara diharapkan akan terus meningkat. [dkr]



REDAKSI

Mikael PH Togatorop (mt),
Ermila Oethari (mil), Suhendri (henz),
Totok (ttk), Ardhiyan (ard), Arief R (arra),
Diah Kusumawati Rukminingtyas (dkr),
Awie Pramayudha (awi), Bayu Satriadi (basa)

ALAMAT REDAKSI :
BPK RI Perwakilan Provinsi
Sumatera Utara Lt. I,
Jl. Imam Bonjol No.22 Medan
Telp. 061-4520044

DARI REDAKSI

LHP DAN TANGGUNG JAWAB PEMERIKSA

Selamat datang kembali rekan-rekan pemeriksa yang baru saja menyelesaikan tugas pemeriksaan LKPD ke daerah. Setelah sekian lama bertugas melakukan pemeriksaan, saatnya kembali ke kantor, dimana tugas baru telah menanti, yaitu penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atau dikenal dengan LHP.

Penyusunan LHP tentu tidak sederhana. Dalam rangka menjaga kualitas dari LHP tersebut, tentu beberapa tahapan kendali harus dilewati. Dan proses penyelesaian LHP tersebut, tentu menguras tenaga dan pikiran. Tapi itulah bentuk tanggung jawab kita selaku pemeriksa dalam menjalankan amanah Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan dan menyerahkan hasil pemeriksa tersebut

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI, pasal 7 menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. Selain DPRD berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (3) bahwa: Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan pula kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Tugas adalah amanah yang harus dijaga, dimana kita wajib bertanggung jawab atas amanah yang diberikan tersebut. Penyusunan dan penyerahan LHP bisa dibidang merupakan bentuk tanggung jawab kita atas tugas pemeriksaan yang dibebankan. Harapan kita bersama, berbagai rekomendasi yang termaktub di dalam LHP tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka melaksanakan tugas mengamankan hak budget rakyat secara efektif. [arra]



klik..... www.medan.bpk.go.id/web

untuk mengunduh versi digital Buletin Sekilas Warta BPK

POJOK ANAK-MEDAN BAHASA

Mandi / Manis Dingin = Es Teh Manis

Hajab = hancur

Lengkong = cincau hitam

Mentiko = belagu, sifat orang yang suka merasa paling hebat dan suka cari masalah

Sumber : www.kamus-medan.blogspot.com



TENTANG BPK RI

Entitas Manakah yang Paling Awal Menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ?

Pemerintah Pakpak Bharat merupakan entitas yang paling awal menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu tanggal 12 Maret 2012

BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA MENERIMA KUNJUNGAN KPPU KPD MEDAN

Rabu, 2 Mei 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah Medan (KPPU KPD Medan). Pihak KPPU KPD Medan yang hadir adalah **Kepala KPPU KPD Medan, Gopprera Panggabean**, didampingi oleh dua staf.



Pertemuan ini selain untuk silaturahmi antar pimpinan kedua lembaga, juga untuk mengkoordinasikan kerjasama antara KPPU KPD Medan dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Banyaknya kasus perkara penyelewengan tender yang ditangani oleh KPPU selama ini menandakan masih rentannya kebocoran keuangan negara lewat praktik-praktik tender yang menyalahi aturan tersebut. Untuk itulah dipandang perlu meningkatkan sinergi antar kedua lembaga, BPK RI dan KPPU.

Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Perwakilan tersebut dihadiri oleh **Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktni; Kepala Subauditorat Sumut II, Ayub Amali; dan Kepala Subbagian Hukum dan Humas, Mikael P.H. Togatorop.** [arra]

FOTO TEMPOE DOELOE

4 Januari 1993
Pertandingan Persahabatan Sepakbola dalam Rangka HUT BPK



SEKILAS MEDIA

Beritasore.com
Rabu, 30 Mei 2012

"Humbahas Pecahkan Rekor LKPD Raih Opini 'Wajar Tanpa Pengecualian'"

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) Muktni, SH menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tahun 2011 memecahkan rekor di Sumut dengan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' (WTP).

Kepala Humas BPK Perwakilan Sumut Mikael Togatorop SH, MHum menyatakan cukup senang atas LKPD yang diraih Humbahas tergolong terbaik dan memecahkan rekor di Sumut.

Pasalnya baru tahun ini atas pemeriksaan keuangan tujuh tahun berturut-turut, ada yang meraih WTP yakni Humbahas. Sedangkan sepuluh Pemkab yang sudah menerima penilaian, semuanya masih opini 'Wajar Dengan Pengecualian' (WDP). "Ini murni hasil kerja keras, diperiksa dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh auditor kami," tegas Mikael.